

2021



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2021 (TRIWULAN III)



BAPPEDA PROVINSI NTB
2021

KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dihatikan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dikelola oleh 54 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 8 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 204.029.267.000,-.

Realisasi sampai triwulan III telah terealisasi Rp. 139.692.746.836 atau 68,47% dengan realisasi fisik mencapai 55,93%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp71.005.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.639.318.903,- atau 67,09% dan realisasi fisik mencapai 60,60%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.941.720.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.75.972.787.683 atau 65,31% dengan realisasi fisik sebesar 73,80%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.080.640.000 atau 53,46% dengan realisasi fisik sebesar 37,22%. Ada beberapa alasan penjelasan atas capaian Satuan Kerja yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada triwulan III ini yaitu (1) masih diterbitkan DIPA ditengah tahun anggaran yang terkait dengan pembangunan pasar, (2) Penunjukan Pengelolaan Keuangan yang masih terlambat, (3) Komunikasi dan komprehensif yang belum terbangun secara baik dengan dan antara pengelola keuangan, (4) Proses Pengadaan barang/Jasa yang membutuhkan waktu dinyatakan gagal lelang,(5) Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang matang dan baik, (6) Pada cocok tanam yang sudah berganti terkait dengan pengadaan bibit tanaman.

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2021 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Oktober 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 204.029.267.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 54 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 8 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satker Provinsi untuk triwulan III sebesar Rp. 173.947.171.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 71.005.451.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 102.941.720.000,- terdapat penurunan sebesar Rp.166.853.964.000,- dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk triwulan II sebesar Rp. 340.801.135.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.99.850.778.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 240.850.357.000,- penurunan alokasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya Refocusing anggaran dan adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diberlakukan oleh Pemerintah. Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.30.082.096.000,- ada kenaikan sebesar Rp.2.160.850.000,- dibandingkan dengan alokasi anggaran pada triwulan II yang dilaksanakan oleh 8 satker pada 6 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Realisasi sampai triwulan III telah terealisasi Rp. 139.692.746.836 atau 68,47% dengan realisasi fisik mencapai 55,93%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.

71.005.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.639.318.903,- atau 67,09% dan realisasi fisik mencapai 60,60%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.941.720.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.75.972.787.683 atau 73,80% dengan realisasi fisik sebesar 65,31%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp. 30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.080.640.250 atau 53,46% dengan realisasi fisik sebesar 37,22%.

Adanya kenaikan pencapaian prosentase baik kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena terdapat beberapa satker sudah melaporkan progres capaiannya, beberapa program dan kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan; dan masih ada beberapa Satker yg juga prosentasenya masih nol persen dan rendah karena adanya refocusing dan realokasi belanja, adanya perubahan pengelola administrasi keuangan pada satker, belum terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan pada beberapa satker; dan adanya program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan oleh satker karena tidak ada bendahara yang bersertifikat, serta adanya pagu DIPA yg terbitnya terlambat sehingga proses penyelesaian kontrak/tender tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	4
BAB II.....	5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2021	5
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021.....	5
2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat	7
BAB III.....	27
REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANATUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.....	27
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB.....	28
A. Dana Dekonsentrasi.....	28
B. Dana Tugas Pembantuan	52
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB	61
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 SARAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2021 Rp. 363.325.711.000, yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 51 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 5 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab IX Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 terkait Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Sedangkan Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada BPKAD.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi NTB.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan III tahun anggaran 2021 yang bersumber dari APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten.Kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**.

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Target Indikator Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,7–9,1
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Rasio Gini (nilai)	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,78–72,95
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	23,55–24,05

Sumber: RKP Tahun 2021

Arah kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajarandalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk dalam bagian Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara yang diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah:

- a. Memfasilitasi pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
- c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
- e. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- g. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara;
- h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup (*life-skills*) dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor strategis.

3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang.
4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga, akses air minum, dan sanitasi di perdesaan.
5. Mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan.
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa yang memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.
7. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana pada tahun 2021 dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam melakukan revitalisasi sebagai antisipasi ancaman gempa, misalnya dalam bentuk adopsi desain rumah dan bangunan tradisional yang relatif tahan gempa. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 adalah:

1. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
3. Terbukanya lapangan kerja berkualitas,

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,2-4,8%
2.	Tingkat Kemiskinan	14,5%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1-7,4%

Sumber: RKP Tahun 2021

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2021 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota Triwulan III yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2021 sebesar Rp. 204.029.267.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.173.947.171.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.71.005.451.000 dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.102.941.720.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.30.082.096.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut:

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2021 melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan

hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.336.126.000,00.

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya; serta Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang

didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.150.569.000,-

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun Anggaran 2021 melalui program Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.995.000,-. Adapun sasarannya untuk meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk

menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah dan mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemantauan produk, Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Program Pelayanan Publik Lainnya, dengan kegiatan dan sub kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada lembaga, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Promosi, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Sarana Pengembangan Kawasan serta Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, alokasi anggaran sebesar Rp.2.311.241.000,-.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.725.199.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;

- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan/

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2021 melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.239.172.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan Desa Dan Perdesaan dan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.743.194.000. Adapun sasarannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2021 melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.927.410.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2021 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 255.893.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.496.725.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;

- c. Meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
- d. Mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
- e. Mengembangkan ekspor daerah; dan
- f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2020 tentang lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.654.646.000. adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

12. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.479.526.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;

- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

13. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Sosial

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Sosial telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum dengan output, Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Program Perlindungan Sosial dengan beberapa kegiatan yaitu, Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu, Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat, Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu yang menghasilkan output, Perizinan Lembaga, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha, Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Program Perlindungan Sosial dengan dua kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana, dengan output Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Bantuan Kebencanaan, Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial dengan outputnya yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa, serta Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Program Sembako dan outputnya berupa bantuan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.589.201.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- b. Peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan PPKS lainnya;

- c. Peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia;
- d. Meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, serta penanganan terhadap konflik sosial dan teror; dan
- f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;

14. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.971.961.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;

- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk

pertanian, Fasilitasi pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.728.283.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- c. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- e. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- f. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- h. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- i. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- j. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat

dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.628.703.000. adapun sasarannya

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.734.000. Adapun sasarannya Pembangunan daerah tertinggal.

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

nomor Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.949.620.000,-. Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, Program nilai tambah dan daya saing industri, dan Program dukungan manajemen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.595.850.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- b. Meningkatkan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
- c. Meningkatkan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
- d. Peningkatan produksi pakan ternak; dan
- e. Mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Perkara Hukum Kelompok Masyarakat Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.543.876.000,-. Adapun sasarannya penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.992.750.000, adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- d. Peningkatan kapasitas logistic perdagangan.

BAB III

REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANATUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2021 sebesar Rp.204.029.267.000 dan sampai triwulan III telah terealisasi Rp. 139.692.746.836 atau 68,47% dengan realisasi fisik mencapai 55,93%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.71.005.451.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.639.318.903,- atau 67,09% dan realisasi fisik mencapai 60,60%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.941.720.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.75.972.787.683 atau 73,80% dengan realisasi fisik sebesar 65,31%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.080.640.250,- atau 53,46% dengan realisasi fisik sebesar 37,22%.

Adanya kenaikan pencapaian prosentase kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena terdapat beberapa satker sudah melaporkan progres capaiannya, terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan; serta ada beberapa Satker yang prosentase kinerja fisiknya masih rendah dan nol persen disebabkan adanya refocusing dan realokasi belanja, adanya perubahan pengelola administrasi keuangan pada satker, keterlambatan terbitnya DIPA, dan adanya program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan oleh satker karena tidak ada bendahara yang bersertifikat. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi dan tugas pembantuan sampai Triwulan III Tahun 2021:

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi NTB yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 46 Satuan Kerja pada Triwulan III ini terdiri dari 38 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 8 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.173.947.171.000 dengan realisasi sebesar Rp.123.612.106.586,- atau 71,06% dan realisasi fisik sebesar 62,96%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi NTB sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

A. Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 12.150.569.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker. Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.375.003.784,- atau 52,47% dengan realisasi fisik mencapai 42,33%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230003 dengan anggaran sejumlah Rp. 258.001.000,- realisasi Keuangannya sebesar Rp.196.088.000,- atau 76,00% dan kinerja fisiknya sebesar 75,0%, dengan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembayaran honor petugas SIMAK BMN Selama 4 Bulan, pembayaran honor pengelola

Satker Selama 4 Bulan, Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Perencanaan Anggaran Ke Kab/Kota baru 2 Kab/Kota, dan kegiatan Pertemuan Pemutakhiran Data.

- b) Satker 239000 dengan anggaran sejumlah Rp. 2.619.803.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.718.700.000,- atau 65,60% dengan kinerja fisik 50,00%, dengan dua program yaitu Program Kesehatan Masyarakat dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan beberapa Pembinaan Kesehatan Keluarga, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penyehatan Lingkungan, Pembinaan Gizi Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Keluarga dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pelatihan Bidang Pendidikan, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Pelatihan Bidang Pendidikan, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sosialisasi dan Diseminasi dan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan. Adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi sehingga Jadwal Pelaksanaan kegiatan tertunda.
- c) Satker 239005 dengan anggaran sejumlah Rp. 1.459.176.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.296.972.421,- atau 20,35% dengan kinerja fisik masih nol persen, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Sosialisasi dan Diseminasi, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Tahap I dilaksanakan di 2 lokus (Bima dan Dompu), sedangkan kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada bulan September.

- d) Satker 239006 dengan anggaran sejumlah Rp 4.995.206.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.314.262.193 atau 66,35% dengan kinerja fisik 64,97%, dengan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal dan Pelayanan Publik Lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin di Kab/Kota, Kegiatan Bimbingan teknis surveilans dan respon KLB/Wabah sudah dilaksanakan di 6 kab/kota sesuai target capaian output, Penyelidikan Epidemiologi di Kab/Kota, Kegiatan Pra Assesment eliminasi malaria Kab/Kota sudah dilaksanakan dan sudah selesai, beberapa Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit TB di Daerah sudah dilaksanakan, Kegiatan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Depresi, Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Mental Emosional dan beberapa kegiatan lainnya mengalami efisiensi anggaran.
- e) Satker 239007 dengan anggaran sejumlah Rp 417.301.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.136.923.070,- atau 32,81% dengan kinerja fisik 18,00%, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha;
- f) Satker 239008 dengan anggaran sejumlah Rp 2.401.082.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.712.058.100,- atau 29,66% dengan kinerja fisik 45,99%, dengan tiga program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program

Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Pelatihan Bidang Sosial.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Analisis Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi, pemutakhiran data tk. Fasyankes, Workshop Verifikasi dan validasi data SDMK, dan pembayaran honorarium pengelola keuangan

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.336.126.000, yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.028.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.028.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggran sebesar Rp.814.890.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.000.000,-. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 464160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 193.208.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.112.776.000,- dengan kinerja fisik 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sosialisasi arah kebijakan DAK Tahun 2022 kepada Kabupaten/Kota, Finalisasi dan pemberian rekomendasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2022.

- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 192.028.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 35.865.900,- atau 18,68% dengan kinerja fisik juga masih nol, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Belum dapat dilaksanakan kegiatan karena kesulitan mendapatkan bendahara yang bersertifikat.
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 814.890.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.147.000,- atau 18,92% dengan kinerja fisik juga masih nol, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Belum dapat dilaksanakan kegiatan karena kesulitan mendapatkan bendahara yang bersertifikat.
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 136.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 38.233.374,- atau 28,11% dengan kinerja fisik juga masih nol, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan). Belum dapat dilaksanakan kegiatan karena kesulitan mendapatkan bendahara yang bersertifikat.

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.995.000,- pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), realisasi keuangan sebesar Rp.196.913.700,- atau 50,75% dengan kinerja fisik 100% yang dilaksanakan

oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan penilaian penghargaan pembangunan daerah kabupaten/kota tahap I dan II se NTB tahun 2021, dan kegiatan fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi (belanja honorarium pejabat pengelola anggaran, belanja fotocopy, belanja penjiilidan, belanja makan minum)

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.311.241.000 yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.1.817.821.648,- atau 78,65% dengan rata rata realisasi fisik 75,22%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 378.795.000,- realisasi keuangannya Sebesar Rp. 215.838.247,- atau 56,98% dengan realisasi fisiknya 66,67%, dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan output yang dihasilkan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal;
- b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp. 244.992.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.186.686.769,- atau 76,20% dengan kinerja fisik 87,73% dengan dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan output yang dihasilkan yaitu Pemantauan produk Pelayanan Publik Lainnya, Layanan Perencanaan dan

Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi dan Layanan Data dan Informasi.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Perjalanan dalam rangka koordinasi dengan kab/kota terkait Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pembangunan SPDN, Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kesyahbandaran, BIMTEK Kesyahbandaran, Honor Kesyahbandaran dan Alat Tulis Kantor, Pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan, Perjalanan dalam rangka koordinasi PIPP dan Honor PIPP, Honor dan perjalan lokal Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan), Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan), Perjalanan dalam rangka koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan di daerah, Honor petugas perijinan, Honor Petugas logbook, Perjalanan dalam rangka coaching statistik perikanan tangkap di Bogor dan Honorarium petugas, Penyusunan statistik perikanan tangkap, dan Honorarium dan penyusunan laporan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

- c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp. 1.179.951.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.992.553.522,- atau 84,12% dengan kinerja fisik 61,22% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan output yang dihasilkan yaitu Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Pelayanan Publik kepada Lembaga, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: pembayaran uji sampel residu udang, pembayaran Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel ke Kabupaten Bima, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan KLU, pembayaran sampel uji kesehatan

ikan, pembayaran perjadin dan pembayaran bahn peralatan sampel, Pembayaran pengujian sampel uji hama penyakit ikan dan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pengambilan sampel uji pada Kabupaten Sumbawa (Lopok kec. Lopok) dan Kabupaten Bima (Langgudu), Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka koordinasi ke Kabupaten/kota dan BPN Kabupaten/Kota se NTB, Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan BPN Kabupaten/Kota untuk Penerbitan Sertifikat bagi Pembudidaya Ikan, Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota dan Badan Pertanahan Nasional untuk percepatan penerbitan sertifikat untuk pembudidaya ikan pada kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Pembayaran Perjalanan Dinas Penilaian Sertifikasi CBIB, Perjalanan Dinas Penilaian Sertifikasi dan Pembinaan CBIB, Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka audit dan sosialisasi CBIB untuk Pembudidaya ikan ke kabupaten Bima (Kec. Langgudu), Dompu dan Lombok Timur (Kec. Aikmel), dan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Pembelian ATK untuk mensuplai keperluan kantor.

- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 151.802.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.120.609.100,- atau 79,45% dengan kinerja fisik 75,00% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, dengan output yang dihasilkan yaitu, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan Umum, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pembinaan POKMASWAS dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara, Dukungan kegiatan Bimtek dari Ditjen PPSDK, Pembinaan di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kegiatan Rakernis Pengawasan SDKP di Bandung Jawa Barat, Honorarium Pengelola Anggaran dan ATK Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Anggaran Satker, Pengumpulan dan Input data Laporan Kinerja Bulanan dan Triwulan, Pengumpulan Bahan

Input data Laporan Persediaan dan SIMMAK BMN, dan Pengumpulan SPJ terkait dengan Belanja Persediaan Untuk dilakukan input ke dalam aplikasi persediaan dan SIMAK BMN.

- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp 143.871.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.130.430.440,- atau 90,66% dengan kinerja fisik 97,65% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan output yang dihasilkan yaitu, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Menghadiri Rakortek di Depok dan Rakernis di Bandung, Jawa Barat, Perjalanan dinas ke Kabupaten Bima dalam rangka koordinasi kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke DKP Kabupaten dan menemui pokmaswas setempat, Melaksanakan Survey untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi di Sumbawa, Melakukan survey ke TPK Kebete di Kabupaten Sumbawa untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ke Sumbawa, Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka jejaring dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati laut, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan DKP Kabupaten Lombok Barat dan Pokmaswas di TWP Gita Nada terkait kemitraan keanekaragaman hayati laut, Melakukan koordinasi dengan instansi setempat di Kabupaten Bima serta melakukan peninjauan lapangan, dan Pelaksanaan kegiatan rapat Penyusunan RANPERGUB Usaha Garam Rakyat dengan instansi terkait.

- f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp 211.830.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.171.703.570,- atau 81,06% dengan kinerja fisik 63,03% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan output yang dihasilkan yaitu, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sarana Pengembangan Kawasan, Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Menghadiri Rakortek di Depok dan Rakernis di Bandung, Jawa Barat, Perjalanan dinas ke Kabupaten Bima dalam rangka koordinasi kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke DKP Kabupaten dan menemui pokmaswas setempat, Melaksanakan Survey untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi di Sumbawa, Melakukan survey ke TPK Kebete di Kabupaten Sumbawa untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ke Sumbawa, Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka jejaring dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati laut, dan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan DKP Kabupaten Lombok Barat dan Pokmaswas di TWP Gita Nada terkait kemitraan keanekaragaman hayati laut.

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 33.046.526.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker yang terdiri dari 5 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.725.199.000,- dan 1 satker pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 11.615.080.000. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan

sebesar Rp.24.430258.526.000,- atau 77,29% dengan rata rata realisasi fisik 71,77%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp 2.938.927.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.161.384.150 atau 73,54% dengan kinerja fisik 64,64%, yang terdiri dari tiga program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dengan output yang dihasilkan yaitu, Sarana Pengembangan Kawasan, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemantauan produk, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sertifikasi Produk, Data dan Informasi Publik.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura, berupa bahan pengendali Ramah lingkungan untuk gerakan pengendalian Sayur dan Buah, Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH, Berupa alat2 dan bahan klinik, pendampingan dan pengawalan pengendalian OPT Hortikultura, pelaksanaan penerapan PHT dilaksanakan di 2 kelompok Tani, yaitu mekar sari kelurahan sayang-sayang kecamatan Cakranegara kota mataram (komoditas cabe) dan Kelompok Tani berriuk sadar 1 desa santong. Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara (komoditas bawang merah). honor pengelola dan insentif petugas pengawas benih tanaman (PBT), honor output kegiatan mantri tani, monev ke kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, honor operasional satuan kerja, ATK dan bahan komputer, dan honor output kegiatan mantri tani, monev dan evaluasi ke kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Lombok Barat, honor operasional satuan kerja, ATK dan bahan komputer.

- b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp 1.713.145.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.191.626.125,- atau 69,56% dengan kinerja fisik 62,50%, yang terdiri dari dua program yaitu, Program Ketersediaan, Akses

dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen, Fasilitas Pembiayaan Pertanian, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni, Fasilitas Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan output yang dihasilkan yaitu, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik kepada masyarakat, Layanan Perkantoran dengan output yang dihasilkan yaitu, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik kepada masyarakat, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah terealisasi berupa supervisi dan pembinaan Kegiatan Teknis Lingkup Air di Kabupaten P. Sumbawa dan P. Lombok, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi di 4 Kab pulau Sumbawa (KSB, Sumbawa, Dompu, Bima), Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi di 7 Kab (Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima), penetapan SK Admin eRDKK telah ditetapkan dengan Nomor: 821.29/Sarpras.28.a/Distanbun. Kegiatan perjalanan dinas dilakukan untuk pendampingan Evaluasi Kartu Tani di Lombok Utara dan Lombok Tengah, Kegiatan perjalanan dinas dilakukan untuk pendampingan Evaluasi Kartu Tani di Lombok Utara dan Lombok Tengah, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Pelaksanaan Kegiatan administrasi keuangan serta Koordinasi Percepatan dan Pembinaan pengawasan ke Kabupaten/kota.

- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.5.747.083.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.890.787.641,- atau 67,70% dengan kinerja fisik 71,19% yang terdiri dari satu Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat dua kegiatan yaitu Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan beberapa output yang dihasilkan yaitu, Sertifikasi Produk, Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, Sarana Pengembangan Kawasan, Layanan

Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.671.758.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.555.187.300 atau 82,65% dengan kinerja fisik 50,00%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen, dengan dua kegiatannya yakni Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan menghasilkan output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Koordinasi pengendalian OPT ke Kab. Lombok Utara, Insentif petugas pelaporan OPT Provinsi dan Insentif petugas pengamat OPT sebanyak 33 orang, Insentif petugas BPT sebanyak 5 org dan Honor Regu Pengendali OPT (RPO) sebanyak 20 orang, Konsultasi/menghadiri pertemuan ke Pusat/Provinsi lainnya masih menunggu jadwal undangan dari pusat, Monitoring dan evaluasi program/kegiatan ke Pulau Lombok dan Sumbawa sebanyak 6 Kabupaten, Insentif Mantri Statistik sebanyak 116 Orang x 1 kali, Pengumpulan data statistik perkebunan ke pulau lombok dan Sumbawa sebanyak 10 kab/kota, dan Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan sebanyak 22 orang

- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp 10.654.286.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 6.669.874.669 atau 62,60% dengan kinerja fisik 41,94%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang menghasilkan output atau keluaran yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran BOP Penyuluh, Pembayaran honor THL TBPP, perjalanan konsultasi pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya, bahan praktek penerapan teknologi CSA padi dan non padi untuk 16 kelompok tani dari total 144 kelompok tani, Kegiatan Dukungan penerapan CSA sudah terlaksana 100 %, Kegiatan Workshop High Value Crop sedang dalam tahap CPCL. Kegiatan

Pusat Data dan informasi sudah membuat display/papan informasi dan setiap lokasi kegiatan (6 BPP) sudah membayar langganan internet sebanyak 6 bulan. Kegiatan Pusat Gerakan Pembangunan Kecamatan Komponen A sudah memasang papan/Plang BPP. Kegiatan Pusat Pembelajaran Komponen A dalam proses perencanaan. Kegiatan Pusat Konsultasi Agribisnis Komponen A sudah melaksanakan pengadaaan running Text untuk menyediakan informasi pasar dan sedang menyusun materi HVC setelah kegiatan HVC selesai dilaksanakan. Kegiatan Pusat Pengembangan Kemitraan Komponen A dalam proses persiapan. Kegiatan Administasi BPP Komponen A sudah terlaksana 100 %. Kegiatan Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca sedang dalam penyelesaian SPJ. Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Kegiatan SIMURP sedang dliaksanakan. Kegiatan Rapat Koordinasi SIMURP akan dilaksanakan bulan Juli. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan SIMURP komponen A akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kegiatan Penumbuhan Calon Pengusaha tani sedang dalam tahap CPCL. Kegiatan Sosialisasi dan Rintisan Penumbuhan Market Linkage SIMURP Komponen A akan dilaksanakan bulan September 2021. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha SIMURP Komponen A akan dilaksanakan bulan agustus, serta penyusunan RKA SIMURP sebanyak 2 kali di provinsi, biaya fasilitasi rutin seudah dicairkan seperti ATK dan Fotocopy. Khusus kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ditunda menunggu selesai nya masa PPKM.

- f) Satker 239220, Satker pada di Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.321.327.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.9.961.399.091 atau 87,99% dengan kinerja fisiknya 85,49%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan terdapat beberapa kegiatan yaitu, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan yang menghasilkan berberapa output yaitu, Pengawasan dan Pengendalian Produk, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok

Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Data dan Informasi Publik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran honor enumerator panel harga, Honor Enumerator Panel Harga dan Pasokan pangan, Pelaksanaan Gelar Pangan Murah dan Promosi TTIC, Pembayaran Honor Petugas TTIC dan Promosi TTIC, Pembayaran Honor Petugas TTIC serta pelaksanaan Gelar Pangan Murah, Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan pada kegiatan GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan pada pelaksanaan GPM di Kabupaten/Kota, Identifikasi potensi dan melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertanian keluarga serta dilaksanakan pembinaan ke lokasi di Kabupaten Lombok timur, Pendampingan kabupaten ke kelompok dan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Pertanian Keluarga, Melaksanakan pertemuan kelompok dan pembinaan ke kelompok, Pelaksanaan monitoring stok pangan pokok strategis oleh kabupaten/kota dan pengolahan data akses pangan, Pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan rapat dengan tim, Pelaksanaan penyusunan PPH pada triwulan III, Melaksanakan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar ke BKP Kementan, Pertemuan koordinasi kelembagaan keamanan pangan, uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan dan pelaksanaan surveilen, Pengambilan sampel dan pembelian rapid test kit, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 6 kelompok di kabupaten Sumbawa, Lombok Barat dan Sumbawa Barat, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 43 kelompok serta dilakukan pembinaan baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 39 kelompok, Pencairan bantuan pemerintah P2L Stunting di Kota Mataram sebanyak 4 kelompok, Pengadaan bahan promosi gerakan diversifikasi pangan, Pelaksanaan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal, dan Pengadaan bahan promosi, sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.239.172.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.432.532.000,- atau 63,98% dengan realisasi fisiknya 69,58% yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembayaran perjalanan dinas ke Kab/Kota dalam rangka monev program strategis koperasi dan UMKM tahun 2021, Pembayaran bahan ATK kegiatan pendataan Koperasi dan UKM, Pembayaran honorarium Tim Pokja enumerator data Koperasi dan UKM, pembayaram honorarium konsultan PLUT, Pembayaran honorarium pejabat pengelola anggaran dan bahan ATK, Pembayaran perjalanan dinas ke Yogyakarta dalam rangka rapat koordinasi bidang Koperasi dan UMKM, dan Pembayaran honorarium SA/SPG bulan Mei 2021 dan terpromosinya produk unggulan Provinsi NTB.

7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp1.743.194.000, yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 350333 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.743.194.000,- atau 65,91%, dengan realisasi fisiknya 69,58%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan Kegiatannya Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pembayaran Honorarium Staff Sekretariat P3MD Existing, Pembayaran Honorarium Pejabat dan Pengelola Dana Dekonsentrasi, Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang, Belanja bahan dan keperluan kantor lainnya (ATK dan Bahan Komputer), Pelaksanaan sewa Kantor TAPM Kabupaten Lombok Utara untuk 1 tahun anggaran, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka : Koordinasi dan Konsultasi Revisi RKAKL TA 2021, asistensi administrasi pertanggungjawaban atas operasional kantor dan verifikasi kantor TAPM Kabupaten, dan Pelaksanaan Belanja sewa 2 unit mobil untuk TPP dan Satker Provinsi.

8. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.927.410.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan III Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.047.840.000 atau 69,95%, dengan kinerja fisiknya 69,57% yang terdiri dari dua program yaitu Program dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

9. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 255.893.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp.198.809.219,- atau 77,69% dengan kinerja fisik juga 100% dengan Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya pengawasan sebanyak 54 perusahaan antara lain: Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 perusahaan, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 7 perusahaan, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 perusahaan, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak

10 perusahaan, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 perusahaan, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3 perusahaan, dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 9 perusahaan.

10. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.496.725.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.149.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.047.576.000,- Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.716.106.480,- atau 47,84% dengan rata rata realisasi fisik 25,00 %. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.149.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.577.200,- atau 38,20% dengan kinerja fisik masih nol persen dengan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.047.576.000,- dengan realisasi keuangan 544.529.280,- atau 51,98% dengan rata rata realisasi fisik 50,00% dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan perlindungan konsumen di Kabupaten Lombok Barat, kegiatan pasar murah, Terbentuknya data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Terbentuknya data stok barang kebutuhan pokok, kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2021, Terselenggaranya kegiatan Pasar Lelang di Mataram,

perjalanan dinas dalam rangka identifikasi pembeli dan penjual potensial, dan kegiatan Bimtek Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT).

11. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.654.646.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.654.646.000,- atau 74,60% dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari satu program yaitu Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Bimtek WUB Pengolahan pangan bagi Kabupaten Bima yang diikuti oleh 20 ikm, Kegiatan Rakor Perindustrian dan Dekranasda se Provinsi NTB, TPL-IKM Kementerian Perindustrian, dan Bimtek Penyamakan Kulit bagi IKM Kabupaten Bima, TPL-IKM NTB,

12. Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.479.526.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 378.966.400,- dengan kinerja fisik sampai triwulan III sudah 100%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

13. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial mengalokasikan dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.589.201.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker, pada Dinas Sosial. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.3.863.717.600,- atau 58,64% dengan rata rata realisasi fisik 65,22%.

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230017, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp 205.055.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 139.926.000 atau 68,24%, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum dengan output, Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, Dekonsentrasi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal, dan Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi
- b) Satker 239020 dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp 891.974.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 455.178.000,- atau 51,03% dengan kinerja fisik 49,72%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan beberapa kegiatan yaitu, Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu, Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat, Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu yang menghasilkan output, Perizinan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- c) Satker 239023, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.3.445.352.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.872.638.600,- atau 54,35% dan kinerja fisik 42,05%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan dua kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana, dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Bantuan Kebencanaan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa assessment bantuan bencana sosial kebakaran di kab. Sumbawa, Kegiatan pengerahan pskba tahun 2021, dan biaya operasional pendamping pkh di 10 kab/kota se-ntb sebanyak 1.159 orang.

- d) Satker 418854, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.183.740.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.100.670.000,- atau 54,79% dan kinerja fisik telah mencapai 100%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial dengan outputnya yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran Operasional Penyuluh sosial Masyarakat, Pembayaran Operasional Perkantoran, dan Suvervisi Relawan di 15 Desa yang berada di Kabupaten Lombok Barat, dan Pembayaran Operasional Perkantoran dan Suvervisi Relawan di 5 Desa yang berada di Kabupaten Lombok Barat
- e) Satker 418974, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.1.863.080.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.295.305.000,- atau 69,52% dan realisasi fisik yaitu 67,66%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Program Sembako dan outputnya berupa bantuan keluarga.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pelaksanaan Rapat Koordinasi PFM Pertama Tingkat Provinsi telah dilaksanakan di Kota Mataram.

14. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.4.387.227.000, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 2 Satker Satker. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.3.457.058.200,- atau 78,80% dengan rata rata realisasi fisik 73,49%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.474.570.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.274.030.000,- atau 57,74% dan realisasi fisik yaitu 77,87%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran;

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pemeriksaan norma kerja dan norma jamsostek dalam kota, Pemeriksaan dan penanganan kasus norma kerja dan jam sosotek di pulau lombok, Pemeriksaan dan penanganan kasus norma kerja,norma jamsostek dan dokter penasehat, Koordinasi penanganan pandemi covid-19, dan Pembinaan norma ketenagakerjaan bagi perusahaan secara virtual dan penanganan covid 19

- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.912.657.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.183.028.200,- atau 81,35% dan realisasi fisik yaitu 69,10%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Kegiatan Pelatihan Untuk angkatan 1 Sedang Di Lembaga, Kegiatan Magang di Industri untuk angkatan 1, dan Kegiatan Pelatihan Untuk angkatan kedua Sedang Di Lembaga, dan Kegiatan Sedang Berjalan Untuk Paket Ke 2 di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 Perusahaan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021 Triwulan III

No .	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	%Realisasi Fisik
1	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	814,890,000	154,147,000	18.92	0.00

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2021

No .	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	%Realisasi Fisik
2	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	193,208,000	112,776,000	58.37	100.00
3	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	192,028,000	35,865,900	18.68	0.00
4	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	136,000,000	38,233,374	28.11	0.00
5	239071	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5,747,083,000	3,890,787,641	67.70	71.19
6	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,938,927,000	2,161,384,150	73.54	64.64
7	239072	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	671,758,000	555,187,300	82.65	50.00
8	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,713,145,000	1,191,626,125	69.56	62.50
9	239224	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10,654,286,000	6,669,874,669	62.60	41.94
10	239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11,321,327,000	7,116,555,941	61.27	56.83
11	239033	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,654,646,000	1,234,353,422	74.60	100.00
12	230003	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	258,001,000	196,088,000	76.00	75.00
13	239000	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,619,803,000	1,718,700,000	65.60	50.00
14	239005	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,459,176,000	296,972,421	20.35	0.00
15	239006	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,995,206,000	3,314,262,193	66.35	64.97
16	239007	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	417,301,000	136,923,070	32.81	18.00

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2021

No .	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	%Realisasi Fisik
17	239008	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,401,082,000	712,058,100	29.66	45.99
18	239028	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	474,570,000	274,030,000	57.74	77.87
19	239225	DINAS TENAGA KERJA PROV. NUSA TENGGARA BARAT (13)	3,912,657,000	3,183,028,200	81.35	69.10
20	230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	205,055,000	139,926,000	68.24	66.67
21	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	891,974,000	455,178,000	51.03	49.72
22	239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,445,352,000	1,872,638,600	54.35	42.05
23	418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,863,080,000	1,295,305,000	69.52	67.66
24	418854	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	183,740,000	100,670,000	54.79	100.00
25	235221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	378,795,000	215,838,247	56.98	66.67
26	239065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	244,992,000	186,686,769	76.20	87.73
27	239066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	1,179,951,000	992,553,522	84.12	61.22
28	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	151,802,000	120,609,100	79.45	75.00
29	239068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	143,871,000	130,430,440	90.66	97.65
30	239069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	211,830,000	171,703,570	81.06	63.03
31	230046	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,239,172,000	623,300,000	27.84	49.21
32	230020	BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	387,995,000	196,913,700	50.75	100.00

No	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
33	230038	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	479,526,000	378,966,400	79.03	100.00
34	230024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	255,893,000	198,809,219	77.69	100.00
35	350333	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB	1,743,194,000	1,148,915,200	65.91	69.58
36	239077	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,047,576,000	544,529,280	51.98	50.00
37	239029	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	449,149,000	171,577,200	38.20	0.00
38	230071	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,927,410,000	2,047,840,000	69.95	69.57
TOTAL			71,005,451,000	47,639,318,903	67.09	60.60

B. Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.728.283.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.532.537.000,- dan 1 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.18.195.746.000,-. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 51.864.012.845,- dengan rata rata realisasi fisik 79,58%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- Satker 239126, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.20.441.735.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.15.004.328.025 atau 73,40% dengan kinerja fisik 68,33%, yang terdiri dari beberapa program

yaitu Program, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Tanaman Pangan, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang menghasilkan output yaitu Sertifikasi Produk, Sarana Pengembangan Kawasan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya penyediaan Sarana perontok padi, jagung dan kedelai terealisasi 97 unit, Berkoordinasi dengan pelaku usaha sorghum di Mataram Pelayanan Petugas Informasi Harga hasil Tanaman Pangan Berkoordinasi dengan bagian PPHP Kementan untuk pelaksanaan pertemuan petugas PIP pada bulan Juli, pembangunan UPH tanaman pangan, Pengujian sampel mutu jagung, Pengujian sample produk kedelai, Pembinaan uji mutu tanaman pangan, Pembinaan dan pengawalan saana pengolahan tanaman pangan, Koordinasi dengan Kab. Dompu, Kota Bima, Lombok Tengah dan Sumbawa untuk potensi CPCL MK II, Identifikasi dan validasi usulan perubahan SK CPCL pengembangan kawasan kedelai dari kabupaten, Validasi usulan perubahan SK CPCL Pengembangan Kedelai, Koordinasi ulang potensi CPCL untuk MK II, dikarenakan CPCL MK I telah melewati jadwal tanam, Koordinasi ke BPSB Pertanian, BBI Pertanian, Kab. Bima dan Kota Bima terkait potensi CPCL di MK II dan informasi data ketersediaan benih kedelai untuk memenuhi usulan CPCL, Koordinasi dengan Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan PPK untuk kelengkapan dokumen CPCL Padi Biofortifikasi yang masih kurang, Identifikasi, verifikasi CPCL pengembangan kawasan shorgum dan padi biofortifikasi ke kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat,

Dompu, Bima dan kota Bima, Koodrinasi kelengkapan SK CPCL Pengembangan Sorgum, dan Realisasi penyaluran benih 2025 Ha,

- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.221.250.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.155.330.440,- atau 94,60% dan realisasi fisiknya 97,00% yang terdiri dari, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sarana Pengembangan Kawasan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi berupa perjalanan dinas, sedangkan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, dan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura masih dalam proses tender.

- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.451.057.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.3.900.856.302,- atau 87,64% dan realisasi fisik 94,40%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sarana Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Sertifikasi Produk, Promosi, Standarisasi Produk, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi diantaranya berupa Pengadaan barang/jasa berupa: Alat pengocok (shaker) 2 unit, Kompor dan perlengkapannya 2 paket, Alat dan Bahan Pembuatan Kompos 50 set untuk kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao di Kab. Lombok Tengah (50 Ha), Pertemuan Kedua dan ketiga (Pembuatan Metabolik Sekunder) MS APH di Karang sidemen batukliang utara Lombok Tengah untuk 2 klp tani yaitu Klp Harapan kita dan mekar sari masing-masing sebanyak 30 orang peserta, kegiatan Pembentukan Kelompok Tani Organik (1 Kelompok), Pendampingan kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Pengadaan barang/jasa berupa : Benih sebanyak 1.200 gram (Dompu), Pupuk NPK sebanyak 6.000 Kg, Pupuk KNO₃ sebanyak 3.200 Kg, Insektisida sebanyak 80 Liter untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Virginia Krosok di Kab. Dompu (20 Ha), Loteng (20 Ha) dan Lotim (20 Ha), Pengawasan pelaksanaan kegiatan Tanaman Tembakau di Kabupaten Dompu, Loteng dan Lotim, Bimbingan teknis Sarana pascapanen Kopi Lombok tengah di Desa Aik Bual Kec. Kopang dan di Desa Lantan Kec. Batuliang Utara dengan jumlah peserta masing-masing 20 orang, Bimbingan teknis Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi Lombok timur di Kelompok Tani Sembalun Hijau Desa Sembalun Lawang Kec. Sembalun dengan Jumlah peserta sebanyak 25 orang, Bimbingan teknis Sarana Fasilitas pengolahan Kopi Lombok tengah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2021 yang bertempat di KWT Suli Asih Desa Aik Berik Kec. Batukliang utara dengan jumlah peserta 40 orang, Pembangunan UPH untuk kegiatan Prasarana Fasilitas Pengolahan Kopi, Pertemuan sosialisasi registrasi pekebun di Kampung Cokelat Senara (KCS) Dusun Senara Desa Genggeling Kec. Gangga Kab. Lombok Utara pada tanggal 4 Maret 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dari 3 klp tani : Tumpang sari (15 org), Tumpang sari II (21 org) dan Bung Mekar (14 org), dan Penyiangan dan Pengendalian hama dan penyakit untuk kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh seluas 5 Ha sudah selesai dilaksanakan

- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.418.495.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.22.610.547.378,- atau 79,56% dan

realisasi fisik 63,88% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Pelayanan Publik Lainnya, Layanan Perkantoran, Pelayanan Publik kepada masyarakat, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk kabupaten Lombok Timur 30 Unit, Lombok Utara 10 Unit dan Kota Bima 10 Unit, Dokumen survey dan investigasi design air sejumlah 13 dokumen untuk pembangunan fisik perpompaan. Telah dicairkan biaya SID untuk Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat dan biaya persiapan kegiatan tersebut untuk 7 kabupaten, Dokumen survey dan investigasi design air sejumlah 16 dokumen untuk pembangunan fisik perpompaan. Telah dicairkan biaya SID untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dan biaya persiapan kegiatan tersebut untuk kabupaten sumbawa, Survei dan Investigasi Design Air untuk kegiatan Irigasi Perpompaan sebanyak 4 dokumen untuk kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 dokumen sehingga total dokumen yang terselesaikan 20 dokumen, pembangunan irigasi prepompaan untuk kabupaten Lombok Barat(2 unit) , Lombok Utara (2 unit) dan Sumbawa Barat (2 unit). Telah terselesaikan 2 unit Irigasi Perpompaan mendukung Hortikultura di Kabupaten Sumbawa, 2 unit irigasi perpompaan mendukung tanaman pangan di kabupaten lombok tengah. Total Irigasi Perpompaan yang terselesaikan sebanyak 6 Unit, pembangunan embung pertanian untuk kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara dengan sistem transfer uang dan pelaksanaan di lapangan dengan sistem padat karya, biaya fasilitator 12 Desa di Kabupaten Sumbawa.

- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.195.746.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.192.950.700,- atau 50,52 % dengan fisik 63,35%,. Terdapat beberapa program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan 'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan yaitu Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.628.703.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.23.722.049.838 atau 80,06% dengan rata rata realisasi fisik 67,21%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.469.675.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.266.827.000,- atau 82,09% dengan fisik 62,98% yang terdiri dari dua program yaitu Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada 16 Daerah Irigasi oleh Petugas OP Irigasi, Pembayaran Gaji untuk bulan Maret dan April 2021 (DI Remening (Lobar), Pengga (Lobar), Mujur (Loteng),Tanggik (Lotim), Pandanduri (Lotim), Batu Jai (Loteng), Surabaya (Loteng), Jurang Sate Hulu (Loteng), Jurang Sate Hilir (Loteng), Jurang Batu (Loteng), Katon Kompleks (Loteng), Batu Bulan (Sumbawa),

Mamak (Sumbawa), Rababaka (Dompu), Katua (Dompu), Pelaparado (Bima). Dan Pembayaran Honor Tim Pelaksana OP Daerah Irigasi, Pembelian bahan pemeliharaan pintu air (OP 2), Peralatan kerja habis pakai dan pengadaan bahan pemeliharaan rutin (OP 4), Penyelesaian Pekerjaan Berkala Pemeliharaan Saluran daerah Irigasi Jurang Sate Hilir kegiatan SKPD TP OP Dinas PUPR NTB (Ruas BJS 15 – BJS 16), (Ruas BJS 16 – BJS 17), (Ruas BJS 17 – BJS 18), (Ruas BJS 18 – BJS 19), pengangkatan sedimentasi, Penyelesaian Pekerjaan Berkala Pemeliharaan Saluran daerah Irigasi Jurang Sate Hulu pada Ruas saluran BSP 4, BKL 4, BPR 3, BPR 5, BBJ 3 dan BSR 4, Pengangkatan sedimentasi, Penyelesaian Pekerjaan Berkala Pemeliharaan Saluran daerah Irigasi Batu Bulan (Sumbawa), Penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan Saluran daerah Irigasi Jurang Sate Hilir, Pekerjaan pengangkatan sedimentasi, menggali dengan Excavator Pekerjaan Saluran daerah Irigasi Jurang Sate Hilir Pekerjaan Saluran daerah Irigasi Jurang Katon Kompleks, Penyelesaian Pekerjaan Berkala Pemeliharaan Saluran daerah Irigasi Jurang Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Daerah Irigasi Katon dan Daerah Irigasi Batu Bulan (Sumbawa), Pekerjaan pengangkatan sedimentasi, menggali dengan Excavator, Perbaikan/penggantian assesoris pintu air perbaikan rumah jaga perbaikan lening saluran, Pekerjaan pemeliharaan rutin (Rambasan) kegiatan SKPD TP OP yang telah dikerjakan pada Daerah Irigasi Remening, Pengga, Mujur II, Tanggik, Pandan Duri Suwangi, (Lombok), Pekerjaan pemeliharaan rutin (Rambasan) kegiatan SKPD TP OP yang telah dikerjakan pada Daerah Irigasi Batu Bulan, Mamak Kakiang, Rababaka, Katua, Pelaparado (Sumbawa, Bima), Pekerjaan pemeliharaan rutin (Rambasan) kegiatan SKPD TP OP yang telah dikerjakan pada Daerah Irigasi Remening, Pengga, Mujur II, Tanggik, Pandan Duri Suwangi, (Lombok), Batu Jai, Surabaya, Jurang Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Jurang Batu dan Katon Kompleks. Dan Pembelian Parang Batek dan Rompi untuk Operasional pekerjaan rambasan saluran. Pembelian Bahan pintu air (Olie gemuk, cat dll), Pekerjaan pemeliharaan rutin (Rambasan) kegiatan SKPD TP OP yang telah dikerjakan pada Daerah Irigasi Batu Bulan, Mamak Kakiang, Rababaka, Katua, Pelaparado (Sumbawa, Bima). Dan Pembelian Parang Batek dan Rompi untuk

Operasional pekerjaan rambasan saluran, Pembelian Bahan pintu air (Olie gemuk, cat dll), dan Pekerjaan pemeliharaan rutin (Rambasan) kegiatan SKPD TP OP yang telah dikerjakan pada Daerah Irigasi Remening, Pengga, Mujur II, Tanggik, Pandan Duri Suwangi, (Lombok), Batu Jai, Surabaya, Jurang Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Jurang Batu dan Katon Kompleks.

- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.159.028.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.455.222.538,- atau 72,34% dengan fisik 71,43% yang terdiri satu program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan).

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.734.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp386.725.000,- atau 66,14% dan realisasi fisik 47,78% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Seleksi Transmigran di Kabupaten Loteng, Lotim, Lobar dan KLU, Pembinaan Mental Spiritual berupa Insentif Da'i Pembina, Asst Da'i Pembina dan Petugas Kebersihan di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa, dan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM. Sedangkan kegiatan fisik masih proses kontrak.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021 Triwulan III

N o.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	%Realisasi Fisik
1	239126	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	20,441,735,000	15,004,328,025	73.40	68.33
2	239127	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,221,250,000	1,155,330,440	94.60	97.00
3	239128	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,451,057,000	3,900,856,302	87.64	94.40
4	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	28,418,495,000	22,610,547,378	79.56	63.88
5	239129	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	18,195,746,000	9,192,950,700	50.52	65.35
6	239234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	23,469,675,000	19,266,827,300	82.09	62.98
7	239237	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	6,159,028,000	4,455,222,538	72.34	71.43
8	350327	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	584,734,000	386,725,000	66.14	47.78
TOTAL ALOKASI PROVINSI			102,941,720,000	75,972,787,683	73.80	65.31

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana APBN dari Kementerian/Lembaga sebanyak 4 Kementerian/Lembaga pada Triwulan III sebesar Rp.30.082.096.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.080.640.250,- atau 53,46% dan rata-rata realisasi fisiknya 37,22%, yang dilaksanakan oleh 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Satker yaitu Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 Satuan Kerja, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 Satuan Kerja, Kota Mataram 1 Satuan Kerja, Kabupaten Bima sebanyak 2 Satuan Kerja dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 Satuan Kerja.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 7.949.620.000,- yang dilaksanakan oleh 3 Satker, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.6.291.455.000,- atau 69,23% dengan rata rata realisasi fisik 63,89%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239242, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.313.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.704.568.800,- atau 45,59% sementara realisasi fisik sebesar 46,67%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan;
- Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa honor operasional satker, Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kegiatan pusat, Biaya perjalanan dinas dalam kota Sosialisasi daerah, Pengadaan Geomembran,

Dokumen perencanaan lahan integrasi pergaraman, Dokumen pekerjaan konsultan perencanaan saluran, dan Dokumen pekerjaan konsultan perencanaan jalan produksi

- b) Satker 230340, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.313.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.067.460.800,- atau 69,08% dan fisik masih 66,67%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa belanja operasional kegiatan, dan kegiatan rembuk daerah.

- c) Satker 239050, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.858.994.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.519.426.000 atau 93,01% dan realisasi fisik 78,33%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Dukungan administrasi kegiatan Usaha Garam Rakyat, dan Pembangunan / Rehabilitasi Saluran / PIPANISASI Tambak Desa.

2. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 595.850.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dengan kode satker 230576 dan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.323.100.600,- atau 54,23% sementara fisik 60,0%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Sosialisasi Ke Kelompok Tani, dan Perjalanan Dinas dan Belanja bahan dalam Persiapan Sarana Pengembangan Bawang Merah. Sedangkan kegiatan fisik masih dalam proses tender.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 7.543.876.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima dengan kode satker 350329 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.553.107.500,- atau 73,61% dan realisasi fisik 68,33%. Adapun Programnya adalah 'Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Perkara Hukum Kelompok Masyarakat Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan).

Kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Fasilitasi Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spiritual, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi, dan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan (dalam proses).

4. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 13.992.750.000,- yang dilaksanakan oleh 3 Satker pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.3.912.976.550,- atau 26,98% dengan realisasi fisiknya masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230159, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.032.548.050,- atau 33,88% sementara realisasi fisiknya masih nol persen. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Adapun output

yang dihasilkan adalah Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berlokasi di Gunung Sari dengan Type D.

- b) Satker 235157, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 902.649.500,- atau 22,57%, sementara realisasi fisiknya masih nol persen. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan Adapun output yang dihasilkan adalah.....
- c) Satker 23928, dengan alokasi anggrannya sebesar Rp. 3.992.750.000,- pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabuapten Sumbawa Barat, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 977.779.000,- atau 24,49%, sementara realisasi fisiknya masih nol persen. Adapun programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Adapun output yang dihasilkan adalah Pembangunan Pasar Rakyat atau Revitalisasi Pasar yang pengalokasiannya di Seteluk. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa belanja operasional kegiatan, dan kegiatan rembuk daerah.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut dibawah berikut ini.

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2021 Triwulan III

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	%Realisasi Fisik
1	239242	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT	1,545,313,000	704,568,800	45.59	46.67
2	230340	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TIMUR	1,545,313,000	1,067,460,800	69.08	66.67

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan III Tahun 2021

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
3	230576	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA	595,850,000	323,100,600	54.23	60.00
4	239050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	4,858,994,000	4,519,426,000	93.01	78.33
5	350330	DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA	7,543,876,000	5,553,107,500	73.61	68.33
6	230159	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT	6,000,000,000	2,032,548,050	33.88	0.00
7	235157	DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM	4,000,000,000	902,649,500	22.57	0.00
8	239289	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SUMBAWA BARAT	3,992,750,000	977,779,000	24.49	0.00
TOTAL ALOKASI KABUPATEN/KOTA			30,082,096,000	16,080,640,250	53.46	37.22

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sebesar Rp.204.029.267.000.000 dan sampai triwulan III telah terealisasi Rp. 139.692.746.836,- atau 68,47% dengan realisasi fisik mencapai 55,93%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.71.005.451.000,- atau dengan realisasi sebesar Rp.47.639.318.903,- atau 67,09% dan realisasi fisik mencapai 60,60%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.941.720.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.75.972.787.683 atau 73,80% dengan realisasi fisik sebesar 65,31%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.16.080.640.250,- atau 53,46% dengan realisasi fisik sebesar 37,22%.

Ada penjelasan atas capaian Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berkaitan dengan permasalahan antara lain (1)) masih diterbitkan DIPA ditengah tahun anggaran yang terkait dengan pembangunan pasar, (2) Penunjukan Pengelolaan Keuangan yang masih terlambat, (3) Komunikasi dan komprehensif yang belum terbangun secara baik dengan dan antara pengelola keuangan, (4) Proses Pengadaan barang/Jasa yang membutuhkan waktu dinyatakan gagal lelang,(5) Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang matang dan baik, (6) Pada cocok tanam yang sudah berganti terkait dengan pengadaan bibit tanaman. Untuk permasalahan yang tersebut diatas beberapa rekomendasi antara lain; (1) segera menyusun kalender kegiatan dan program dalam pelaksanaan kegiatan. (2) Pemetaan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di setiap Satker termasuk kesiapan kapasitas teknis pelaksanaan Dekon dan Tugas Pembantuan, (3) Perencanaan

penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan idealnya dilakukan semaksimal mungkin karena akan berdampak strategis dan signifikan, (4) Meningkatkan koordinasi antara satker-satker dengan Biro Administrasi Pembangunan selaku pelaksana pokja pengadaan barang jasa, (5) Komunikasi dan koordinasi antar unit pengelola keuangan dilakukan sesering mungkin hingga tercipta Kerjasama.

Peningkatan pencapaian kinerja fisik dan keuangan bila dibandingkan dengan pencapaian pada triwulan II ini disebabkan karena terdapat beberapa satker yang melaporkan progres capaiannya, beberapa program dan kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan; tetapi ada juga beberapa Satker yang kinerja fisiknya masih nol persen karena adanya refocusing dan realokasi belanja, adanya perubahan pengelola administrasi keuangan pada satker, belum terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan pada beberapa satker; dan adanya program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan oleh satker karena tidak ada bendahara yang bersertifikat, serta kegiatan fisik masih dalam proses penyelesaian kontrak/tender, karena keterlambatan DIPA yang diterbitkan.

4.2 SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mempercepat proses refocusing dan realokasi anggarannya serta penataan administrasi baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-

monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.